

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Implementasi Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya

Ade Iskandar

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambai di Kabupaten Kolaka Utara

Eka Suaib

Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Dengan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang

Malik

Pengaruh Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah tangga Miskin (Raskin) Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Kendari Barat)

H. Muh. Amir

Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis Single Identity di Kabupaten Lampung Utara

Nia Janati

Evaluasi Pengarusutamaan Gender Dalam Program *Rural Infrastructure Support* PNPM Provinsi Lampung

Selvi Diana Meilinda

Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara

Yadi Lustiadi



e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

Penanggung Jawab

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Ketua Penyunting

Dr. Malik, M.Si

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Yulianto, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Supriyanto, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Akhmad Suharyo, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Nur Efendi, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal, M.Si (FISIP-UHO)

Penyunting Pelaksana

Dra. Azima Dimiyati, MM

Vida Yunia Cancer, S.AN

Tata Usaha

Winda, SE

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu – Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 789825, Fax: (0721) 770261, E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

DAFTAR ISI

Implementasi Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya	1-13
Ade Iskandar	
Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambai di Kabupaten Kolaka Utara	14-29
Eka Suaib	
Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Dengan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang	30-46
Malik	
Pengaruh Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Kendari Barat)	47-60
H. Muh. Amir	
Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis <i>Single Identity</i> di Kabupaten Lampung Utara	61-70
Nia Janati	
Evaluasi Pengarusutamaan Gender Dalam Program <i>Rural Infrastructure Support</i> PNPM Provinsi Lampung	71-87
Selvi Diana Meilinda	
Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara	88-101
Yadi Lustiadi	

**EVALUASI KEBIJAKAN LAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK (KTP-EL) SEBAGAI BENTUK PENERAPAN IDENTITAS
BERBASIS *SINGLE IDENTITY NUMBER* DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
OLEH
NIA JANATI, DOSEN ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UBL**

ABSTRACT

Electronic identity card program is one of the government programs relating to the administration of population the purpose electronic ID card program according to Law No. 24 Year 2013 on the amandement of the Act No. 23 Year 2006 concerning Population Administration Population Administration was later every citizen of Indonesia or the public will only have one ID Card with a valid Citizen Identification Number, Accuracy database of Indonesia's population, as well as an electronic ID Card is also designed to be faster making process.

Riset problem in this research is how achievement targets and policy target program Electronic Identity Card, How do the result of the implementation of the procedures and mechanism Electronic Identity Card program policies and what are the resources used in the implementation of the Electronic Identity Card program policy in the North Lampung regency. To know that in this case the researchers took the theory of public policy evaluation of Wayne Parson about formative evaluation which can be seen from reached targets and objectives, the consistency of the mechanism of implementation procedures and resources used. The method in this study used a qualitative approach, data collection techniques done with participatory observation, interview and documentatition.

The result showed that the application of an electronic ID card service policy in North Lampung regency is not running effectively this can be seen in terms of targets and objectives have not been achieved, terms of implementation mechanism of the electronic ID card program in North Lampung regency has not been implemented consistenly in accordance with the procedures set and terms of human resources and fund is in the implementation of the electronic ID card program in North Lampung regency is still inadequate.

Keywords: Policy, Public policy evaluation, Electronic ID card Program

A. PENDAHULUAN

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. (UU No. 23 tahun 2006 pasal 4). Pada implementasi kebijakan administrasi kependudukan dalam

pembuatan KTP yang selama ini dijalankan pemerintah, sudah bukan rahasia umum lagi jika kita mendengar keganjalan – keganjalan yang terjadi pada pembuatan KTP waktu itu. Banyak permasalahan yang muncul mulai dari pembuatan KTP yang lama, berbelit-belit, adanya tindakan KKN, tidak transparansinya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam membuat KTP tersebut, pelayanan yang kurang ramah, antrian panjang dan waktu yang lama. Oleh karena itu pemerintah memanfaatkan dan menggunakan

kecanggihan teknologi yang mulai marak saat ini untuk membuat program sebagai upaya mengatasi dan memperbaiki sistem lama dengan melahirkan program KTP-el. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dengan demikian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang diproses secara komputerisasi dan dilengkapi chip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan seseorang atau masyarakat. Program KTP-el membawa harapan baru dalam menangani permasalahan yang lama. KTP-el juga dibuat agar masyarakat dapat lebih mudah dalam membuat data diri dengan menggunakan sistem teknologi digital. Tujuan program KTP elektronik menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah:

1. Setiap warga negara Indonesia atau masyarakat nantinya hanya akan memiliki 1 kartu tanda penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
2. Akurasi database penduduk Indonesia.
3. KTP-el juga dirancang untuk lebih cepat dalam proses pembuatannya, dengan biaya yang gratis untuk pembuatan KTP-el massal atau perdana.

Namun dalam penerapan KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara masih terdapat permasalahan – permasalahan yang muncul seperti: Masih ada penduduk yang memiliki KTP-el

ganda dengan wilayah yang berbeda, Terdapat kesalahan pada proses input data penduduk, KTP-el yang sudah tercetak ternyata belum di aktivasi, kurangnya sosialisasi dalam pembuatan KTP-el, SDM atau operator yang kurang profesional, Adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan dan Pembagian KTP-el yang lama dan tidak serempak. Setiap kebijakan atau program yang dibuat pemerintah baik berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat perlu dilakukan penilaian tentang keberhasilan atau kegagalan suatu program tersebut. Maka berdasarkan uraian diatas pada pelaksanaan program KTP-el tersebut peneliti merasa penting dan tertarik melakukan penelitian ini untuk menilai efektivitas dari salah satu program pemerintah yakni dengan cara mengevaluasi kebijakan layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai bentuk penerapan identitas berbasis *Single Identity Number* di Kabupaten Lampung Utara.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Hogwood dan Gunnyang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu (Edi Suharto, 2008;3). Disamping itu Hogwood dan Gunn menyebutkan sepuluh penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern yakni sebagai label untuk sebuah bidang aktifitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktifitas negara yang di harapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otoritas formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil, sebagai teori atau model dan juga sebagai proses (Wayne Parsons, 2014;15). Menurut Landau, kebijakan publik sebagai bentuk lain dari analisis politik yang menggunakan metafora atau model sebagai perangkat untuk menjelajahi dunia yang tidak dikenal dan mungkin yang

tidak diketahui secara politik “ *Public policy, as other forms of political analysis, uses metaphors or models as devices to explore the unknown and possibly unknowable world of politics.* (Edi soeharto 2004:23): Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat atau dipilih untuk diambil oleh suatu lembaga pemerintah, baik pejabat maupun instansi pemerintah yang merupakan pedoman pegangan ataupun petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan dalam kenyataannya, kebijakan seringkali diartikan dengan peristilahan lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.

Menurut Thomas Dye kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara Lasswel dan Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau Negara atas nama instansi yang dipimpinya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi pembangunan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk keputusan formal. Kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung arti: (1) hasil produk keputusan yang diambil dari komitmen

bersama, (2) adanya formulasi, (3) pelaksanaannya adalah orang-orang dalam organisasi, (4) adanya perilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan. Kebijakan atau policy penggunaannya sering disama artikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang – undang, ketentuan – ketentuan, usulan – usulan atau rancangan besar. Sedangkan pengertian policy menurut perserikatan bangsa – bangsa adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersifat umum atau khusus, berdasarkan luas maupun sempit, transparan maupun kabur (tidak jelas), terinci maupun global. Dengan demikian, pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu baik bersifat militer dan non militer, dengan memproyeksikan program – program.

Kebijakan publik sering dikaitkan dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Kemudian berkaitan dengan penelitian ini juga dapat disebutkan bahwa Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan sebuah kebijakan yang telah dibuat atau dipilih oleh pemerintah.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam waluyo pada buku *Konsep Administrasi dan manajemen publik di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (waluyo, 2007:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Sudarwan Danim

(2004:14) mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah: "Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Studi evaluasi kebijakan salah satunya adalah Evaluasi formatif yang peneliti pilih untuk mengevaluasi penerapan Program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara, evaluasi ini merupakan evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan/program sedang diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi program tersebut. Oleh karena itu menurut palumbo dalam parsons(2014 ;549) fase implementasi memerlukan evaluasi formatif yang memonitor cara dimana sebuah program dikelola dan diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Rosse dan Freeman dalam Parson (2014:550) mendeskripsikan model evaluasi ini sebagai evaluasi pada tiga persoalan untuk nanti dapat diketahui efektifitas dari sebuah program yakni Sejauhmana sebuah program mencapai target populasi yang tepat, Apakah penyampaian mekanisme pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak. Dan Sumber daya apa yang digunakan dan dikeluarkan dalam melaksanakan program.

Menurut Sekaran (dalam Novita,2013:75) Kerangka fikir dalam penelitian kualitatif adalah penguasaan hasil tangkapan peneliti atas fenomena sosial yang diamati serta model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah penting. Untuk lebih jelas maka kerangka fikir penelitian ini diaplikasikan melalui gambar diatas dengan penjelasan dibawah ini.

E-government muncul membawa cara baru yang baik dalam tata pemerintahan kita sehingga hal ini harus diaplikasikan karena memiliki kelebihan-

kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan cara tradisional yang dilakukan pemerintah dalam melakukan interaksi selama ini. Keuntungan yang paling diharapkan dari *e government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Beberapa contoh penerapan *e-government* di Indonesia antara lain adanya website resmi pemerintah pusat dan daerah, pusat jaringan internet kecamatan/postek, *e-service*, *e-registration*, *e-budgetting*, *KTP elektronik* dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasis elektronik. Pada sistem administrasi kependudukan terutama pada pembuatan kartu identitas kependudukan yang selama ini bermasalah menuntut pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam sistem pelayanannya. Upaya memperbaiki sistem tersebut akhirnya pemerintah membuat suatu program berbasis penggunaan teknologi yang lebih canggih yakni dengan melahirkan program *elektronik* KTP (*KTP-el*). Namun pada implementasinya ternyata program ini diindikasikan masih menimbulkan persoalan atau permasalahan-permasalahan seperti belum tercapainya tujuan dari program ini. Kabupaten Lampung Utara sebagai salah satu daerah di Propinsi Lampung yang merupakan bagian dari Indonesia juga sudah mulai mengimplementasikan program *KTP el* sejak tahun 2012 dan dari hasil pra survey yang yang peneliti lakukan disalah satu Kecamatan masih terdapat permasalahan yang muncul antara lain: masih adanya masyarakat yang memiliki *KTP* ganda, Terdapat kesalahan pada proses input data penduduk, *KTP-el* yang sudah tercetak ternyata belum di aktivasi, kurangnya sosialisasi dalam pembuatan *KTP-el*, *SDM* atau operator yang kurang profesional, Adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan dan Pembagian *KTP-el* yang lama dan tidak serempak .

Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tentang evaluasi program KTP-el di Kabupaten Lampung Utara. Adapun yang akan peneliti nilai dapat dilihat dari efektivitas program KTP-el ini, untuk melihat efektivitas tersebut peneliti memilih evaluasi formatif terhadap pengukuran kinerja program dilihat dari 3 aspek yakni : - target dan sasaran program, - Mekanisme/prosedure pelayanan dalam penerbitan KTP el dan - Sumber Daya yang dipakai atau digunakan oleh program KTP-el. Maka setelah mengetahui dan mendapatkan data informasi tentang ke 3 aspek tersebut peneliti akan dapat menilai apakah program tersebut sudah berjalan secara efektif atau tidak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis *Single Identity Number* Di Kabupaten Lampung Utara ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti akan menilai pelaksanaan dari program KTP elektronik secara formatif dengan melihat dari beberapa indikator yakni bagaimanakah ketercapaian target dan sasaran program ini, konsistensi mekanisme program yang dijalankan, dan sumber daya yang digunakan pada penerapan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam penelitian ini selain pedoman wawancara, recorder, pedoman observasi, alat tulis dan dokumen yakni peneliti sendiri. Alasan mengapa peneliti menjadi penentu keberhasilan suatu penelitian adalah karena peneliti di dalam penelitian kualitatif adalah alat yang dituntut untuk objektif terhadap fokus penelitian yang ada dilapangan dan bagaimana si peneliti itu menemukan temuan-temuan di dalam penelitian ini nantinya mampu menghasilkan kesimpulan yang objektif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 21 (dua puluh satu) orang. Teknik

Pengumpulan Data observasi Partisipasi, metode wawancara, metode dokumentasi dan materi audio visual. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teknik keabsahan data digunakan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu 1) derajat kepercayaan (*credibility*), 2) keteralihan (*transferability*), 3) kebergantungan (*dependability*) dan 4) kepastian (*confrimability*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketercapaian target dan sasaran program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara

Dalam penerapan Program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara, target yang ingin di capai adalah tertuju pada penduduk wajib KTP yang terdaftar sebagai Penduduk berdomisili di Kabupaten Lampung Utara. Di Kabupaten Lampung Utara sendiri, capaian Perekaman KTP elektronik yang telah dilaksanakan hingga Desember 2014 baru mencapai sekitar 84% dari jumlah total penduduk wajib KTP di Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 632.997 sedangkan yang baru melakukan perekaman tercatat hanya 536.915 jiwa. Untuk jumlah KTP elektronik fisik yang telah diterima masyarakat berjumlah 513.403 jiwa atau sekitar 81%. Dari capaian target ini membuktikan bahwa dalam capaian Program KTP elektronik masih belum maksimal, karena masih ada sekitar 16% dari jumlah seluruh penduduk wajib KTP di Kabupaten Lampung Utara yang belum melakukan perekaman dan memiliki KTP elektronik. Kemudian Adanya kendala terkait partisipasi masyarakat yang masih rendah karena masih menganggap bahwa KTP lama masih berlaku sehingga mereka enggan untuk membuat KTP elektronik, padahal sudah jelas bahwa pemerintah hanya

memberlakukan kartu identitas diri masyarakat berupa KTP elektronik dan tidak memberlakukan lagi KTP lama, hal ini juga bisa menjadi sebuah hambatan dalam pencapaian target dan sasaran program kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Lampung Utara. Dalam hal ini menurut peneliti perlu adanya keseriusan dari para aktor pelaksana dalam hal mencapai target yang telah ditentukan. Karena dalam suatu kebijakan, target sasaran program ini telah ditetapkan dan disepakati oleh setiap pihak baik dalam hal perencanaan, penyediaan sumber daya, anggaran, dan aspek lainnya, hingga pada pelaksanaan baik itu disposisi wewenang dan tanggung jawab, pembagian tugas dan sebagainya, sampai akhirnya masyarakat memiliki yang namanya produk kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah KTP elektronik.

2. Mekanisme penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Lampung utara

a. Sosialisasi

sosialisasi memang telah dilakukan oleh petugas pelayanan di Kabupaten Lampung Utara ini melalui tatap muka langsung, Kemudian sosialisasi juga dilakukan melalui pemasangan spanduk himbauan kepada masyarakat tentang perekaman kartu tanda penduduk elektronik dipusat-pusat kota Kabupaten Lampung Utara, namun pada tingkat Kecamatan masih sangat kurang maksimal karena masyarakat masih sedikit paham tentang apa sebenarnya fungsi dan manfaat dari KTP elektronik ini sendiri

b Sarana dan Prasarana Tempat Pelayanan KTP Elektronik di Kabupaten Lampung Utara

Penyediaan sarana alat perekaman KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara disediakan dan mendapatkan bantuan peralatan dari pusat untuk dibagikan di masing-masing kecamatan yang ada di

Kabupaten Lampung Utara Adapun perangkat-perangkat yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pelayanan perekaman data kependudukan KTP elektronik untuk dilaksanakan di Kabupaten Lampung Utara Sarana dan prasarana tempat yang dimiliki Kabupaten Lampung Utara sudah terbilang cukup memadai seperti ruang tunggu dengan jumlah kursi atau tempat duduk yang lebih dari cukup sehingga masyarakat yang hendak melakukan proses perekaman KTP elektronik dapat menunggu dengan rasa nyaman. fasilitas pendukung kebijakan KTP elektronik untuk melaksanakan proses perekaman data kependudukan KTP elektronik lengkap dan terpenuhi namun masih terdapat kendala pada alat-alat yang dibagikan hampir 50 persen mengalami kerusakan yang akhirnya menghambat pelaksanaan kebijakan ini.

1. Pendistribusian dan Pemasangan Perangkat KTP Elektronik di Kabupaten Lampung Utara

Dalam hal ini pendistribusian dan pemasangan alat perangkat KTP elektronik sudah didistribusikan. Dengan didistribusikannya perangkat alat penunjang KTP elektronik seharusnya mempercepat proses pelaksanaan KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara namun dalam pendistribusian perangkat dan pemasangannya di kecamatan satu dengan yang lainnya tidak dilakukan secara serentak yang disebabkan oleh kurangnya teknisi yang ada untuk pemasangannya sehingga memperlambat pelaksanaan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara.

2. Pemasangan Perangkat Jaringan Komunikasi Data di Kabupaten Lampung Utara

Perangkat jaringan komunikasi data yang digunakan dalam program kartu tanda penduduk elektronik di

Kabupaten Lampung Utara memang mengikuti aturan pusat yang mana pemerintah sudah menentukan *provider* jaringan indosat sebagai jaringan komunikasi data pada program ini, namun masih terjadi permasalahan yang menghambat kinerja pelaksanaan program ini, bahwa masih sering terjadi gangguan jaringan di kantor kecamatan maupun kabupaten.

3. Bimbingan Teknis (BIMTEK) penerapan KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Teknis dalam rangkaian Penerbitan KTP Elektronik Di Kabupaten Lampung Utara. telah diberikannya bimbingan teknis pada program kartu tanda penduduk elektronik dalam bentuk pelatihan selama 4 hari, adapun peserta pelatihan merupakan calon operator kecamatan di seluruh Kabupaten Lampung Utara.

4. Pelaksanaan perekaman data & pelayanan pengambilan kartu tanda penduduk elektronik Di Kabupaten Lampung Utara

Dalam proses perekaman data masyarakat petugas atau dalam hal ini operator kecamatan maupun Kabupaten Lampung Utara telah melakukan sesuai prosedur yang ada. Namun dalam proses pelayanan pengambilan kartu tanda penduduk elektronik masih belum dijalankan sesuai prosedur karena operator tidak menarik KTP lama masyarakat dan tidak melaksanakan standar operasional prosedur dalam pengambilan KTP elektronik maka hal ini menjadi penyebab ketidak seimbangannya antara KTP elektronik yang dibagikan dengan KTP lama yang seharusnya ditarik aparatur guna menghindari terjadinya kesalahan

pada KTP lama tersebut. KTP lama tidak dikembalikan kepusat sama saja artinya bahwa masyarakat masih memiliki kartu identitas ganda meskipun perbedaan terdapat pada bentuk fisiknya. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat disalahgunakan dan memang sudah melanggar prosedur yang ada.

3. Sumber Daya dalam penerapan program kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Lampung Utara

a. Sumber Daya manusia dalam penerapan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara.

Sumber Daya Manusia dalam penerapan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara dari segi kuantitas sudah dirasa cukup namun dari segi kualitas masih kurang baik aparatur yang mempunyai keahlian untuk mampu mengoperasikan komputer dengan baik dari segi software maupun hardware masing kurang banyak dan tidak tertera adanya mekanik yang mempunyai tugas dan fungsi dalam memperbaiki kerusakan alat baik berupa software dan hardware yang sewaktu-waktu terjadi di lapangan pada saat berjalannya proses perekaman KTP elektronik, sehingga proses perekaman KTP elektronik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan hal tersebut mengenai sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara dapat dikatakan kurang baik. hal ini dilihat dari sisi pendidikan rata-rata operator ktp elektronik hanya lulusan SMA sederajat padahal jelas dalam peraturannya operator ktp elektronik minimal lulusan D3 informatika kemudian dari sisi teknis sumber dayanya masih sangat kurang karena petugas teknis hanya 3 orang

dan itu hanya ada ditingkat kabupaten yakni di dinas kependudukan dan catatan Sipil kabupaten lampung utara.

b. Sumber Daya Dana dalam penerapan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam penerapan KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara Sumber daya dana bersumber dari dana APBD yang diberikan melalui anggaran seluruh program dari Disdukcapil Kabupaten lampung Utara. Adapun anggaran yang dikeluarkan adalah untuk pembiayaan insentif operator dan pendamping operator Kabupaten Lampung Utara dan untuk anggaran biaya sosialisasi program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara. Namun anggaran yang ada dianggap masih kurang karena tidak adanya dana atau anggaran khusus untuk biaya perawatan perangkat lunak dan keras di Kabupaten Lampung Utara.

Dari hasil pembahasan penelitian tentang penilaian evaluasi program KTP elektronik di Kabupaten lampung utara yang masih belum berjalan efektif, peneliti mengkaji lebih dalam penyebab ketidakberhasilan tersebut. Menurut peneliti berdasarkan data dan analisis yang telah didapat sebelumnya, dalam menjalankan sebuah kebijakan yang memiliki peran penting yang sangat berpengaruh besar adalah dari sisi pelaksana/implementor dalam menjalankan proses kebijakan. hal ini dapat dilihat dari implementor dalam melaksanakan kebijakan KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara yang belum secara konsisten menjalankan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan kurang berhasilnya pencapaian target dan sasaran kebijakan. selain itu ini juga

mempengaruhi proses penempatan sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang masih belum tepat. Oleh karena itu menurut peneliti pada intinya peran birokrat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam hal ini apabila birokrasi di Kabupaten Lampung Utara sudah dijalankan secara ideal oleh para birokrat dalam menjalankan kebijakan program KTP elektronik maka kemungkinan besar pelaksanaan layanan kebijakan program KTP elektronik sebagai salah satu bentuk penerapan identitas *berbasis single identity number* dapat berhasil dalam pelaksanaannya di Kabupaten Lampung Utara.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Program Kartu Tanda Penduduk elektronik dalam penerapan identitas berbasis *single identity number* di Kabupaten Lampung Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi ketercapaian target dan sasaran program kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Lampung Utara masih belum tercapai , karena Ketidakjelasan informasi penerbitan KTP elektronik dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, rendahnya partisipasi masyarakat, dan banyaknya sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Ketidaktercapaian ini juga dapat dilihat dari jumlah total penduduk wajib KTP di di Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 632.997 hanya 536.915 yang baru melakukan perekaman sedangkan jumlah KTP elektronik fisik yang diterima masyarakat hanya berjumlah 513.403.
2. Dari segi mekanisme pelaksanaan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara belum dijalankan secara konsisten sesuai dengan prosedur yang

telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan seperti sosialisasi yang dijalankan belum sesuai dengan peraturan, pendistribusian perangkat yang tidak serentak karena kekurangan teknis, perangkat jaringan komunikasi data yang masih sering mengalami gangguan, dan pemberian bimbingan teknis yang terbatas membuat pelaksanaan program ktp elektronik di Kabupaten Lampung Utara masih belum berjalan secara baik dan lancar .

3. Dari segi sumber daya manusia dalam penerapan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara masih kurang memadai, salah satu faktor yang berperan penting dalam program ini adalah Petugas operator perekam KTP elektronik tidak semuanya berlatar belakang pendidikan komputer yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Sehingga ketidakmampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan tugasnya dapat menjadi penyebab kurang berhasilnya program KTP elektronik yang ada di Kabupaten Lampung Utara.
4. Dalam penerapan KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara hanya dianggarkan untuk pembiayaan insentif operator dan biaya sosialisasi program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan perangkat KTP elektronik masih belum ada anggaran khusus yang dikeluarkan.

F. SARAN

1. Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara sebaiknya bisa lebih meningkatkan koordinasi dan memberikan sosialisasi KTP elektronik terhadap instansi terkait yakni pemerintah pusat dan Kecamatan-kecamatan yang ada di Lampung Utara serta lembaga-lembaga seperti lembaga kesehatan, perbankan, lembaga

pendidikan dan lembaga lainnya yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan memiliki keterkaitan dengan adanya KTP elektronik agar lebih bersinergi dan bekerja sama dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KTP elektronik.

2. Hendaknya pemerintah merevisi Standar Operasional Prosedur dalam Program KTP elektronik dalam hal pemberian wewenang penerbitan KTP elektronik dengan cara memberikan hak akses cetak KTP elektronik kepada pemerintah daerah setelah pemerintah pusat melakukan verifikasi keabsahan data masyarakat yang akan melakukan penerbitan KTP elektronik. agar masyarakat dapat merasakan kecepatan pelayanan pada program KTP elektronik di Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Lampung Utara
1. Mengingat pentingnya jaringan komunikasi data yang berkualitas baik dalam penerapan program KTP elektronik maka pemerintah hendaknya mempertimbangkan dalam hal pemilihan provider jaringan komunikasi data sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
2. Bagi tenaga operator petugas pelayanan KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara perlu diberikan pelatihan dalam hal perawatan, pemeliharaan dan perbaikan perangkat KTP elektronik agar meminimisir terjadinya kerusakan yang dapat mengakibatkan terkendalanya proses perekaman KTP elektronik.
3. Sebaiknya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan perangkat keras dan lunak KTP elektronik agar alat yang rusak bisa cepat diperbaiki dan dapat berfungsi dengan baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhilah, 2001. *Kebijakan publik dan Paktiknya*. Bandung, Cahaya Gemilang.
- Hasan, Iqbal, 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Kumorotomo Wahyudi dan Pramusinto Agus. 2009. *Governance Reform di Indonesia*. Yogyakarta, Gava Media.
- Misuraca. 2007. *Menggagas implementasi E-Government edisi Terjemaahan*. Jakarta, Dwi Aksara.
- Moleong, L.J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nurhadiantomo, Castle dan Suyatno. 1983. *Birokrasi pemerintahan*. Yogyakarta, Kanisius.
- Parsons, Wayne. 2014. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta, PT Prenadamedia Group.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Rian Nugraha . 2008. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Raykin, Garlin 2002. *Memahami Komunikasi Kelompok Organisasi*. Bandung, Spektrum Pemikiran LSP-STKS.
- Sudarwan Danim . 2004. *Memahami analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Permai asri.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik* . Jakarta, Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan RnD*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Kompleksitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Grasindo.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. LP Universitas Lampung. Lampung
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam pelaksanaan Otonomi daerah)*. Bandung. Mandar Maju.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Kasus)*. Jakarta, PT Buku Seru.
- Zauhar. 1996. *Pola Dasar sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta, PT Ina Publikatama.

Sumber lain:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.
- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Perpres No.26 tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional
- Buku Pedoman Penerbitan KTP-el tahun 2011.

ISSN : 2443-1214

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

Diterbitkan Oleh :
Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi
Universitas Bandar Lampung

